BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



LAPORAN KEUANGAN AUDITED

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2025

kukar.bawaslu.go.id

Jl Diponegoro No.52
Kel.Panji, Kec.Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kutai Kartanegara. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tenggarong, 7 Mei 2026
Kepala Satuan Kerja
Sekretariat Bawaslu Kab Kutai Kartanegara



Rusmini, SE., MM
NIP. 19750205 200604 2 018

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 1

Daftar Isi 2

Pernyataan Tanggung Jawab 3

Ringkasan 4

I. Laporan Realisasi Anggaran 6

II. Neraca 8

III. Laporan Operasional 9

IV. Laporan Perubahan Ekuitas 10

V. Catatan atas Laporan Keuangan 11

A. Penjelasan Umum 11

B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 25

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca 27

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional 35

E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 41

F. Pengungkapan Lainnya 43

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jl. Diponegoro No.52 Tenggarong Kutai Kartanegara
Phone : 0851-6311-1553 email : sekretariatbawaslukukar@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tenggarong, 7 Mei 2026
Kepala Satuan Kerja
Sekretariat Bawaslu Kab Kutai Kartanegara

Rusmini, SE., MM
NIP. 19750205 200604 2 018

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 353.660.024,00 atau mencapai 85,78 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 412.271.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp596.635.000,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.839.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp594.796.000,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.423.380,00 dan Rp594.211.620,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp369.638.350,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp369.638.350,00. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp 0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp369.638.350,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp0,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp369.638.350,00 serta ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp963.849.970,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp594.211.620,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA. 2025		% thd Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
A. Pendapatan Negara dan Hibah				
I. Pendapatan Perpajakan		0,00	0,00	0,00
1. Pajak Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00
2. Pajak Perdagangan Internasional		0,00	0,00	0,00
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam		0,00	0,00	0,00
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan		0,00	0,00	0,00
3. Pendapatan BLU		0,00	0,00	0,00
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		0,00	0,00	0,00
III. Pendapatan Hibah		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
B. Belanja Negara	B.2			
I. Belanja Pemerintah Pusat		**412.271.000,00**	**353.660.024,00**	**85,78**
1. Belanja Pegawai	B.3	83.880.000,00	46.902.000,00	55,92
2. Belanja Barang	B.4	328.391.000,00	306.758.024,00	93,41
3. Belanja Modal	B.5	0,00	0,00	0,00
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang		0,00	0,00	0,00
5. Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00
6. Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00
7. Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00
8. Belanja Lain-lain		0,00	0,00	0,00
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa				
1. Transfer ke Daerah		**0,00**	**0,00**	**0,00**
a. Dana Perimbangan		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Dana Transfer Umum		**0,00**	**0,00**	**0,00**
a. Dana Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00
b. Dana Alokasi Umum		0,00	0,00	0,00
2. Dana Transfer Khusus		**0,00**	**0,00**	**0,00**
a. Dana Alokasi Khusus Fisik		0,00	0,00	0,00
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0,00	0,00	0,00
b. Dana Insentif Daerah		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Dana Keistimewaan DIY		**0,00**	**0,00**	**0,00**
d. Dana Otonomi Khusus		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Dana Desa		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Hibah kepada Daerah		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jumlah Belanja Negara (B.1 + B.II)		**412.271.000,00**	**353.660.024,00**	**85,78**
C. Pembiayaan		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tenggarong, 7 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat Bawaslu Kab Kutai Kartanegara

Rusmini, SE., MM
NIP. 19750205 200604 2 018

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

II. NERACA

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NERACA
PER 31 Desember 2024 dan 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	0,00	0,00
Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)	C.3	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntuan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.4	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.5	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntuan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.6	0,00	0,00
Persediaan	C.7	1.839.000,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		**1.839.000,00**	0,00
Aset Tetap			
Tanah	C.8	562.424.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	C.9	953.738.065,00	0,00
Gedung dan Bangunan	C.10	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.11	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.12	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	C.13	(921.366.065,00)	0,00
Jumlah Aset Tetap		**594.796.000,00**	0,00
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.14	42.850.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.16	(42.850.000,00)	0,00
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Aset		**596.635.000,00**	0,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.17	2.423.380,00	0,00
Uang Muka dari KPPN	C.18	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.19	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.423.380,00	0,00
Jumlah Kewajiban		**2.423.380,00**	0,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.20	594.211.620,00	0,00
Jumlah Ekuitas		**594.211.620,00**	0,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		**596.635.000,00**	0,00

Tenggarong, 7 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat Bawaslu Kab Kutai Kartanegara

Rusmini, SE., MM
NIP. 19750205 200604 2 018

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

III. LAPORAN OPERASIONAL

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025
dan 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan		0,00	0,00
Beban			
Beban Pegawai	D.2	46.902.000,00	0,00
Beban Persediaan	D.3	4.167.000,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	117.906.153,00	0,00
Beban Pemeliharaan	D.5	7.305.738,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	177.963.513,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	15.393.946,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	0,00	0,00
Jumlah Beban		**369.638.350,00**	0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional		**(369.638.350,00)**	0,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset	D.9	0,00	0,00
Pendapatan Pelepasan Aset		0,00	0,00
Beban Pelepasan Aset		0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0,00	0,00
Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		**(369.638.350,00)**	0,00
POS LUAR BIASA	D.11		
Beban Luar Biasa		0,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	D.12	**(369.638.350,00)**	**(0,00)**

Tenggarong, 7 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat Bawaslu Kab Kutai Kartanegara

Rusmini, SE., MM
NIP. 19750205 200604 2 018

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025
dan 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Ekuitas Awal	E.1	0,00	0,00
Surplus/Defisit LO	E.2	(369.638.350,00)	0,00
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.3	0,00	0,00
Penyesuaian Nilai Aset		0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		0,00	0,00
Koreksi Lain-Lain	E.3.1	0,00	0,00
Transaksi Antar Entitas	E.4	963.849.970,00	0,00
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E.5	594.211.620,00	0,00
Ekuitas Akhir	E.6	**594.211.620,00**	0,00

Tenggarong, 7 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat Bawaslu Kab Kutai Kartanegara

Rusmini, SE., MM
NIP. 19750205 200604 2 018

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum dan Profil Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

Dasar Hukum dan Profil Entitas

1. Dasar Hukum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

   Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

(1) Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten adalah:

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten yang meliputi:

   1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
   2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. dan pencalonan gubernur;
   3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. dan calon Bupati;
   4. Penetapan calon Bupati;
   5. Pelaksanaan kampanye;
   6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
   7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
   8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
   9. Rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan;

10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang. Pemilu lanjutan. dan Pemilu susulan; dan
11. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan Bupati;

b. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;

c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;

d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;

e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;

g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;

h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan

i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

(2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bawaslu Kabupaten dapat:

a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi

administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan

b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

2. Profil Sekretariat Bawaslu Kabupaten

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten dikepalai oleh Kepala Sekretariat yang bertanggung jawab kepada Sekretariat Pengawas Pemilu Provinsi. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian. yaitu:

a) Kepala Sub bagian Administrasi;
b) Kepala Sub bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat;
c) Kepala Sub bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data. pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi

Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap. persediaan. dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegaramenerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan Akuntansi

A.4. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip. dasar-dasar. konvensi-konvensi. aturan-aturan. dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan entitas

pelaporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegaraadalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi. yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar. Aset Tetap. Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir. apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000

(sepuluh juta rupiah);

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas. diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah. jalan/irigasi/jaringan. dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus. ketinggalan jaman. tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang. rusak berat. tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR). atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya. dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan

metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar. aset tetap. dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud. tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan. aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan). dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software/Aplikasi Komputer	4
Lisensi	10

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

d. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  a. Kewajiban Jangka Pendek

     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

e. Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode 2025 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Per 31 Desember 2025 telah dilakukan 2 (dua) kali revisi yaitu:

1. Revisi ke-01, dengan tanggal revisi 04 November 2025;
2. Revisi ke-02, dengan tanggal revisi 18 November 2025;

Revisi Anggaran ke-01 merupakan revisi tingkat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk penambahan Anggaran Gaji dan Tunjangan bagi CPNS dan PPPK yang telah dilantik pada 1 Juli 2025 Sebesar Rp12.901.000,00. Perubahan atas revisi tersebut dirincikan sebagai berikut:

Tabel 1. Revisi Anggaran Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara ke-01

Uraian	2025	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Belanja		
Belanja Pegawai	70.979.000,00	83.880.000,00
Belanja Barang	328.391.000,00	328.391.000,00
Belanja Modal	0,00	0,00
Jumlah Belanja	**399.370.000,00**	**412.271.000,00**

Revisi anggaran ke-02 merupakan revisi tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan penyesuaian dan penambahan nomenklatur berdasarkan peruntukkan kebutuhannya yaitu menambah nomenklatur Kendaraan Operasional (Pinjam pakai) dan Pajak Kendaraan serta menyesuaikan kebutuhan belanja perjalanan dinas antara Perjalanan dinas dalam kota, Perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas paket meeting luar kota.

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp 0,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025, tidak mengalami perubahan jika dibandingkan periode 31 Desember 2024.

Perbandingan Realisasi Pendapatan
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Des 2025 (Rp)	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Negara Rp353.660.024,00

Realisasi Belanja Instansi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp353.660.024,00 atau 85,78% dari anggaran belanja sebesar Rp412.271.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025		% Realisasi Anggaran
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Pegawai	83.880.000,00	46.902.000,00	55,92
Belanja Barang	328.391.000,00	306.758.024,00	93,41
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Kotor	**412.271.000,00**	**353.660.024,00**	**85,78**
Jumlah	**412.271.000,00**	**353.660.024,00**	**85,78**

Dibandingkan dengan 31 Desember 2024, realisasi belanja per 31 Desember 2025 tidak dapat dibandingkan dengan belanja pada tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan Bawaslu Kutai Kartanegara menjadi satker aktif per Oktober 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja
per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 31 Des 2025 (Rp)	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	46.902.000,00	0,00	-
Belanja Barang	306.758.024,00	0,00	-
Belanja Modal	0,00	0,00	-
Jumlah	**353.660.024,00**	0,00	**-**

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Rp46.902.000,00

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp46.902.000,00 dan Rp0,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Des 2025 (Rp)	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	18.902.000,00	0,00	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	0,00	0,00	-
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	28.000.000,00	0,00	-
Belanja Lembur	0,00	0,00	**-**
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	0,00	0,00	-
Jumlah Belanja Kotor	**46.902.000,00**	0,00	-
Pengembalian Belanja Pegawai	0,00	0,00	-
Jumlah Belanja	**46.902.000,00**	0,00	-

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp46.902.000,00 seluruhnya berasal dari Anggaran Rupiah Murni (RM) yang dipergunakan untuk Pembayaran Uang Makan PNS dan PPPK bulan Oktober s.d. Desember 2025.

Realisasi Belanja Barang Rp306.758.024,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp306.758.024,00 dan Rp0,00.

Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	103.272.172,00	0,00	-
Belanja Barang Non Operasional	1.350.000,00	0,00	-
Belanja Barang Persediaan	6.006.000,00	0,00	-
Belanja Jasa	10.860.601,00	0,00	-
Belanja Pemeliharaan	7.305.738,00	0,00	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	177.963.513,00	0,00	-
Jumlah Belanja Kotor	306.758.024,00	0,00	-
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	-
Jumlah Belanja	306.758.024,00	0,00	-

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 sebesar Rp306.758.024,00 seluruhnya berasal dari anggaran Rupiah Murni (RM) yang dipergunakan untuk:

1. Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan
3. Layanan Perkantoran;
4. Layanan Manajemen SDM;

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.7 Persediaan

Persediaan
Rp1.839.000,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.839.000,00 dan Rp0,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
Barang Konsumsi	1.839.000,00	0,00
Persediaan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	**1.839.000,00**	**0,00**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik, yang terdiri dari:

No	Kode Barang	Jenis Barang	Nominal (Rp)
1	1010301001	Alat Tulis	212.000,00
2	1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	200.000,00
3	1010301003	Penjepit Kertas	176.000,00
4	1010301006	Ordner Dan Map	200.000,00
5	1010301010	Alat Perekat	129.000,00
6	1010301012	Staples	34.000,00
7	1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	55.000,00
8	1010302001	Kertas HVS	108.000,00
9	1010303002	Tinta Cetak	525.000,00
10	1010309001	Meterai	200.000,00
Total			**1.839.000,00**

Mutasi nilai Persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo Nilai Perolehan per 1 Jan 2025	**0,00**
Mutasi Tambah	
Pembelian – Barang Konsumsi	6.006.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	**6.006.000,00**
Mutasi Kurang	
Pemakaian – Barang Konsumsi	4.167.000,00
Jumlah Mutasi Kurang	**4.167.000,00**
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	**1.839.000,00**

Penjelasan Mutasi:

1. Pembelian sebesar Rp6.006.000,00 merupakan pembelian persediaan yang terdiri dari:

No	Kode	Nama Barang	Kuantitas	Jumlah (Rp)
1	1010301001	Alat Tulis	20	532.000,00
2	1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	10	250.000,00
3	1010301003	Penjepit Kertas	36	461.000,00
4	1010301006	Ordner Dan Map	6	860.000,00
5	1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	1	7.000,00
6	1010301010	Alat Perekat	12	129.000,00
7	1010301012	Staples	7	78.000,00
8	1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	14	120.000,00
9	1010302001	Kertas HVS	24	1.265.000,00
10	1010303002	Tinta Cetak	11	1.225.000,00
11	1010304004	Tinta/Toner Printer	4	550.000,00
12	1010306010	Batu Baterai	10	129.000,00
13	1010309001	Meterai	40	400.000,00
Total			**195**	**6.006.000,00**

2. Mutasi kurang berupa pemakaian persediaan sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp 4.167.000,00 terdiri dari:

No	Kode	Nama Barang	Kuantitas	Jumlah (Rp)
1	1010301001	Alat Tulis	16	320.000,00
2	1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	2	50.000,00
3	1010301003	Penjepit Kertas	31	285.000,00
4	1010301006	Ordner Dan Map	4	660.000,00
5	1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	1	7.000,00
6	1010301012	Staples	4	192.850,00
7	1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	4	269.850,00
8	1010302001	Kertas HVS	22	68.075,00
9	1010303002	Tinta Cetak	7	177.850,00
10	1010304004	Tinta/Toner Printer	4	2.475.975,00
11	1010306010	Batu Baterai	10	1.837.425,00
12	1010309001	Meterai	20	50.850,00
Total			**125**	**4.167.000,00**

Tanah

Rp562.424.000,00

C.8 Tanah

Saldo aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp562.424.000,00 dan Rp0,00. Saldo Tanah sebesar Rp562.424.000,00 merupakan transfer masuk dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur atas hibah tanah kantor Bawaslu Kutai Kartanegara.

Peralatan dan Mesin

Rp953.738.065,00

C.9 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp 953.738.065,00 dan Rp 0,00.

Rincian peralatan dan mesin yang ada, adalah sebagai berikut (isi laporan barang):

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nominal (Rp)
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	7	16.000.000,00
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	18.703.000,00
3060102128	Camera Digital	2	24.100.000,00
3060207005	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	1	3.750.000,00
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	29.000.000,00
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	3.078.500,00
3050206002	Televisi	1	9.949.000,00
3100102001	P.C Unit	17	131.454.580,00
3100102002	Lap Top	12	95.696.985,00
3050104001	Lemari Besi/Metal	5	11.600.000,00
3050206016	Mic Conference	1	9.750.000,00
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	398.300.000,00
3050204004	A.C. Split	14	45.350.000,00
3050201003	Kursi Besi/Metal	30	31.900.000,00

3050206008	Sound System	1	9.800.000,00
3050104005	Filing Cabinet Besi	2	2.900.000,00
3050201004	Kursi Kayu	5	17.500.000,00
3050104007	Brandkas	1	3.700.000,00
3050105048	LCD Projector/Infocus	2	22.740.000,00
3050201002	Meja Kerja Kayu	23	41.300.000,00
3050104003	Rak Besi	3	2.700.000,00
3010304001	Transportable Generating Set	1	9.466.000,00
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	1	15.000.000,00
Total		**140**	**953.738.065,00**

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2025	0,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	0,00
Transfer Masuk	1.516.162.065,00
Perolehan Lainnya	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	**1.516.162.065,00**
Mutasi Kurang	
Penghentian Aset dari Penggunaan	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Saldo Per 31 Desember 2025	**1.516.162.065,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(921.366.065,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	**594.796.000,00**

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa transfer masuk merupakan transfer BMN yang berasal dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Mutasi Transfer Masuk
Peralatan dan Mesin TA 2025

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nominal (Rp)
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	7	16.000.000,00
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	18.703.000,00

3060102128	Camera Digital	2	24.100.000,00
3060207005	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	1	3.750.000,00
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	29.000.000,00
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	3.078.500,00
3050206002	Televisi	1	9.949.000,00
3100102001	P.C Unit	17	131.454.580,00
3100102002	Lap Top	12	95.696.985,00
3050104001	Lemari Besi/Metal	5	11.600.000,00
3050206016	Mic Conference	1	9.750.000,00
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	398.300.000,00
3050204004	A.C. Split	14	45.350.000,00
3050201003	Kursi Besi/Metal	30	31.900.000,00
3050206008	Sound System	1	9.800.000,00
3050104005	Filing Cabinet Besi	2	2.900.000,00
3050201004	Kursi Kayu	5	17.500.000,00
3050104007	Brandkas	1	3.700.000,00
3050105048	LCD Projector/Infocus	2	22.740.000,00
3050201002	Meja Kerja Kayu	23	41.300.000,00
3050104003	Rak Besi	3	2.700.000,00
3010304001	Transportable Generating Set	1	9.466.000,00
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	1	15.000.000,00
Total		**140**	**953.738.065,00**

C.9 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Rp921.366.065,00

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp921.366.065,00 dan Rp0,00. Nilai Akumulasi Penyusutan tersebut terdiri atas:

Keterangan	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	921.366.065,00	0,00
Total	**921.366.065,00**	**0,00**

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025:

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akm Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	953.738.065,00	(921.366.065,00)	32.372.000,00
Total		**953.738.065,00**	**(921.366.065,00)**	**32.372.000,00**

C.10 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp42.850.000,00

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp42.850.000,00 dan Rp0,00.

Aset Lain-Lain merupakan aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan. Aset Lain-Lain pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara berupa *software* Komputer.

Rincian aset lain-lain, adalah sebagai berikut:

Kode Barang	Jenis BMN	Nilai Perolehan (Rp)
8.01.01.01.001	Software Komputer	42.850.000,00
Total		**42.850.000,00**

Mutasi transaksi terhadap Aset Lain-Lain pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2025	**0,00**
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	42.850.000,00
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	42.850.000,00
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	**0,00**
Saldo Per 31 Desember 2025	**42.850.000,00**
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(42.850.000,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	**0,00**

C.12 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Aset Lainnya Rp42.850.000,00

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp42.850.000,00 dan Rp0,00. Rincian akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya terdiri atas:

Keterangan	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
A. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**
B. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya		
Akumulasi Amortisasi Software	(42.850.000,00)	(42.850.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Lain-Lain yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0,00	(0,00)
Jumlah	**(42.850.000,00)**	**(42.850.000,00)**
Total Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	**(42.850.000,00)**	**(42.850.000,00)**

C.13 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp2.423.380,00

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp2.423.380,00 dan Rp0,00. Utang kepada pihak ketiga ini terdiri dari:

Keterangan	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0,00	0,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	2.423.380,00	0,00

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
Total	**2.423.380,00**	**0,00**

Belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp 2.423.380,00 merupakan pembayaran atas anggaran tahun 2025 yang belum dibayarkan kepada penerima. Rincian belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp2.423.380,00 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	Tagihan Listrik dan Air	2.423.380,00	Tagihan keluar di bulan Januari Tahun 2026
Total		**2.423.380,00**	

C.15 Ekuitas

Ekuitas

Rp594.211.620,00

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp594.211.620,00 dan Rp0,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset sebesar Rp963.849.970,00 dan kewajiban sebesar Rp369.638.350,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(369.638.350,00)	0,00	(369.638.350,00)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	963.849.970,00	0,00	963.849.970,00	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	594.211.620,00	0,00	594.211.620,00	0
EKUITAS AKHIR	**594.211.620,00**	**0,00**	**594.211.620,00**	0

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP Rp0,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis Pendapatan	31 Des 2025	31 Des 202	Kenaikan / Penurunan (%)
Pendapatan Jasa Giro	0,00	0,00	-
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**-**

Tidak terdapat perbedaan jumlah Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada Laporan Operasional per 31 Desember 2025.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp46.902.000,00

Jumlah Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp46.902.000,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Uraian	Realisasi 31 Des 2025 (Rp)	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Uang Makan PNS	18.902.000,00	0,00	-
Beban Uang Makan PPPK	28.000.000,00	0,00	-

Jumlah Beban Kotor	**46.902.000,00**	0,00	**-**
Pengembalian Beban Pegawai	(0,00)	(0,00)	**-**
Jumlah Beban Pegawai	**46.902.000,00**	**0,00**	**-**

Tidak terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja pegawai dibandingkan jumlah beban pegawai per 31 Desember 2024. Hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Mutasi Tambah	
Belanja Pegawai (LRA)	46.902.000,00
Jumlah Mutasi tambah	**46.902.000,00**
Mutasi Kurang	
Jurnal Kekurangan Uang Kehormatan	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	**0,00**
Jumlah Beban Pegawai per 31 Des 2025	**46.902.000,00**

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp4.167.000,00

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.167.000,00 dan Rp0,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Des 2025 (Rp)	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	4.167.000,00	0,00	-
Beban Persediaan Lainnya	0,00	0,00	-
Jumlah	**4.167.000,00**	**0,00**	**-**

Terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja barang persediaan dibandingkan jumlah beban persediaan per 31 Desember 2025. Hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Saldo Awal	
Barang Konsumsi	0,00
Persediaan Lainnya	0,00
Mutasi Tambah:	
Belanja Barang Persediaan – Barang Konsumsi	6.006.000,00
Perolehan Lainnya	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	**6.006.000,00**
Mutasi Kurang	
Sisa Persediaan Per 31 Desember 2025	
1. Barang Konsumsi	1.839.000,00
2. Persediaan Lainnya	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	**1.839.000,00**
Jumlah Beban Persediaan per 31 Des 2025	**4.167.000,00**

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp117.906.153,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp117.906.153,00 dan Rp0,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian Jenis Beban	Realisasi 31 Des 2025 (Rp)	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	72.567.172,00	0,00	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	4.380.000,00	0,00	0,00
Beban Barang Operasional Lainnya	26.325.000,00	0,00	0,00
Beban Bahan	1.350.000,00	0,00	0,00
Beban Langganan Listrik	12.381.481,00	0,00	0,00
Beban Langganan Air	902.500,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Kotor	**117.906.153,00**	**0,00**	**0,00**
Pengembalian Beban	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jumlah Beban Barang dan Jasa	**117.906.153,00**	**0,00**	**0,00**

Terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja barang dan jasa dibandingkan jumlah beban barang dan jasa per 31 Desember 2025. Hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa	**115.482.773,00**
Mutasi Tambah	
Belanja yang Masih Harus Dibayar	
Belanja Langganan Listrik	2.246.880,00
Belanja Langganan Air	176.500,00
Jumlah Mutasi Tambah	**117.906.153,00**
Mutasi Kurang	
Jurnal Balik atas Beban Tahun yang Lalu	0,00
Belanja Barang Dibayar di muka	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	**0,00**
Jumlah Beban Barang dan Jasa Per 31 Des 2025	**117.906.153,00**

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp7.305.738,00

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 7.305.738,00 dan Rp0,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Realisasi 31 Des 2025 (Rp)	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.305.738,00	0,00	-
Jumlah Beban Kotor	7.305.738,00	0,00	-
Pengembalian Beban Pemeliharaan	**(0,00)**	(0,00)	-
Jumlah Beban Pemeliharaan	**7.305.738,00**	**0,00**	-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp177.963.513,00

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp177.963.513,00 dan Rp0,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian Jenis Beban	Realisasi 31 Des 2025 (Rp)	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	137.200.500,00	0,00	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.440.000,00	0,00	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	33.323.013,00	0,00	-
Jumlah Beban Kotor	**177.963.513,00**	**0,00**	-
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas	**(0,00)**	**(0,00)**	-
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	**177.963.513,00**	**0,00**	-

Tidak terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja perjalanan dinas dibandingkan jumlah beban perjalanan dinas per 31 Desember 2025, hasil mutasi beban yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah:		
Belanja Perjalanan Dinas	**Rp**	**177.963.513,00**
Belanja yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	**Rp**	**177.963.513,00**
Mutasi Kurang:		
Pengembalian atas Beban Perjalanan Biasa	Rp	0,00
Pengembalian atas Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	0,00
Pengembalian atas Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	**Rp**	0,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025	**Rp**	**177.963.513,00**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp15.393.946,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.393.946,00 dan Rp0,00. Beban Penyusutan merupakan beban

untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Lain-lain. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	Realisasi 31 Des 2025 (Rp)	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	15.393.946,00	0,00	-
Jumlah Penyusutan	**15.393.946,00**	**0,00**	-
Beban Amortisasi Software	0,00	0,00	-
Jumlah Amortisasi	**0,00**	**0,00**	**-**
Jumlah Penyusutan dan Amortisasi	**15.393.946,00**	**0,00**	**-**

D.11 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Rp0,00

Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

D.12 SURPLUS (DEFISIT) LO

Defisit LO
(Rp369.638.350,00)

Defisit LO per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp369.638.350,00 dan Rp0,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp0,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp369.638.350,00

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp369.638.350,00 dan Rp0,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp963.849.970,00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp963.849.970,00 dan Rp0,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	353.660.024,00
Transfer Masuk	610.189.946,00
Jumlah	**963.849.970,00**

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp353.660.024,00. DKEL sebesar Rp353.660.024,00 merupakan belanja netto yang berasal dari anggaran rupiah murni, terdiri dari:

Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain

Uraian	Nilai (Rp)
Belanja Pegawai	46.902.000,00
Belanja Barang	306.758.024,00
Belanja Modal	0,00
Jumlah	**353.660.024,00**

E.4.2 Transfer Masuk

Transfer masuk sebesar Rp610.189.946,00 merupakan transfer masuk atas peralatan dan mesin dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur ke Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara. Rincian dari transfer masuk sebesar Rp610.189.946,00 adalah sebagai berikut.

Rincian Transfer Masuk

Uraian	Nilai (Rp)
Transfer Masuk Tanah	562.424.000,00
Transfer Masuk Peralatan dan Mesin	953.738.065,00
Akumulasi Penyusutan	(905.972.119,00)
Jumlah	**610.189.946,00**

E.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/penurunan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp594.211.620,00 dan Rp0,00.

Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan Ekuitas Rp594.211.620,00

Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
Surplus/Defisit LO	(369.638.350,00)	0,00
Transaksi Antar Entitas	963.849.970,00	0,00
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	594.211.620,00	0,00
Ekuitas Akhir	**594.211.620,00**	**0,00**

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp594.211.620,00

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp594.211.620,00 dan Rp0,00. Nilai ekuitas akhir merupakan akumulasi nilai ekuitas awal sebesar Rp0,00 ditambah kenaikan ekuitas sebesar Rp594.211.620,00.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk dalam Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas A yang terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Bagian Administrasi;
b. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat; dan
c. Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

F.2 Pejabat Perbendaharaan

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tanggal 1 Januari 2025 telah ditunjuk Pejabat Pengelola Satuan Kerja dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Rusmini, S.E., M.M. Sepanjang tahun 2025, telah terdapat pengangkatan pejabat perbendaharaan dengan rincian sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Nomor SK	Tanggal SK
1.	Pejabat Pembuat Komitmen	Rusmini, S.E., M.M	B-157/KU.01.00/KI-03/10/2025	01 Oktober 2025
2.	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar	Lirandifa Putri Suratna, S.I.P	B-157/KU.01.00/KI-03/10/2025	01 Oktober 2025
3.	Bendahara Pengeluaran	Saili Ulfa Nudiya, S.Si	B-157/KU.01.00/KI-03/10/2025	01 Oktober 2025

F.3 Rekening yang Dikelola

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengelola rekening Rupiah Murni (RM).

Rekening yang masih aktif dikelola per 31 Desember 2025 adalah adalah sebagai berikut:

Uraian	Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening
RM Bawaslu Kutai Kartanegara	Mandiri	BPG 046 BWS KUTAI KARTANEGARA	8100126861861000

F.4 Pengungkapan Laporan Kinerja dan Program Prioritas Nasional (PN)

1. Laporan Kinerja Satuan Kerja

Kode	Kegiatan	Belanja							
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CQ.5245	**Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota**	**16.204.000,00**	**13.600.500,00**	**83,93**					
CQ.5245.BIC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	16.204.000,00	13.600.500,00	83,93	1	1	Laporan	100	
CQ.7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	11.180.000,00	8.790.000,00	78,62					
CQ.7014.QIC.002	Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	11.180.000,00	8.790.000,00	78,62	1	1	Laporan	100	
WA.6849	**Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum**	**227.507.000,00**	**174.346.511,00**	**76,63**					
WA.6849.EBA.994	Layanan Manajemen dan Perkantoran	227.507.000,00	174.346.511,00	76,63	1	1	Layanan	100	
WA.6850	**Pengelolaan Organisasi Dan SDM**	**157.380.000,00**	**156.923.013,00**	**99,71**					
WA.6850.EBA.962	Layanan Umum	157.380.000,00	156.923.013,00	99,71	1	1	Dokumen	100	
Total		**412.271.000,00**	**353.660.024,00**	**85,78**					

F.6 Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Bawaslu telah mengimplementasikan PIPK tersebut dengan telah menentukan akun signifikan yaitu:

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran;
2. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah;
3. Peralatan dan Mesin; dan
4. Beban Perjalanan Dinas Biasa (524111).

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan Penilaian Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan melakukan penilaian terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas. Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi. Berdasarkan hasil penilaian tersebut Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara tidak ada temuan, baik kelemahan material, kelemahan signifikan maupun kelemahan yang berdampak rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah efektif.